



# LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PELABUHAN PERIKANAN  
SAMUDERA BUNGUS

TRIWULAN II  
2025

PPS BUNGUS  
**RANCAK**  
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
<b>BAB II PENGUMPULAN DATA SKM</b> .....	<b>3</b>
2.1 Pelaksana SKM .....	3
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM .....	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	4
<b>BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM</b> .....	<b>6</b>
3.1 Jumlah Responden SKM .....	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) .....	7
<b>BAB IV ANALISIS HASIL SKM</b> .....	<b>9</b>
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan .....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	9
4.3 Tren Nilai SKM .....	10
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>12</b>
1. Kuesioner .....	13
2. Hasil Pengolahan Data .....	14
3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya .....	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diterapkan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif.

Oleh karena itu, pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparaturnya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

## **BAB II**

### **PENGUMPULAN DATA SKM**

#### **2.1 Pelaksana SKM**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilaksanakan oleh Pokja Dukungan Manajerial berkolaborasi dengan Tim Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

#### **2.2 Metode Pengumpulan SKM**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penilaian terhadap kepuasan masyarakat pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2025 di PPS Bungus ini adalah dengan membagikan tautan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2025 dari aplikasi SUSAN KKP. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana**, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2025 ini dilakukan di area Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah berdasarkan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PPS Bungus. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada Bulan April s.d Juni 2025, dengan rincian:

No	Tanggal	Kegiatan
1.	1 April s.d 25 Juni 2025	Melakukan survey secara daring kepada pengguna jasa layanan
2.	26 Juni s.d 11 Juli 2025	Mengolah data, membuat laporan dan selanjutnya dipublikasikan

### 2.5 Penetapan Jumlah Responden

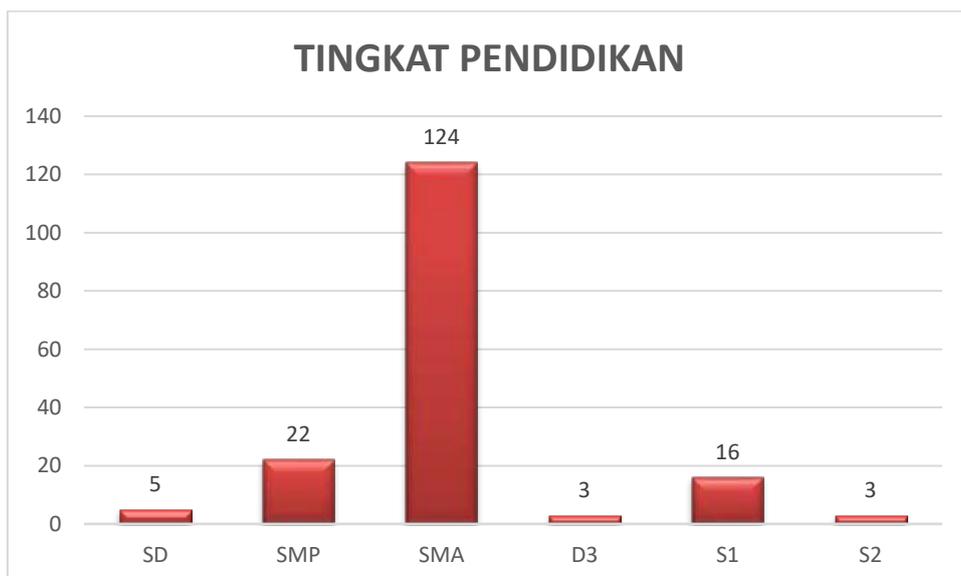
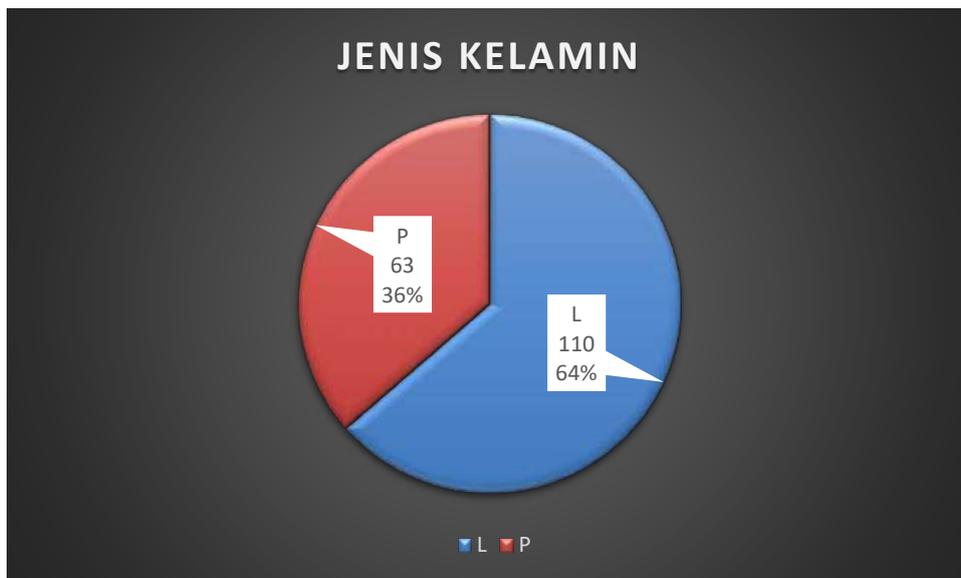
Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan adalah 250 responden. Selanjutnya responden dipilih secara

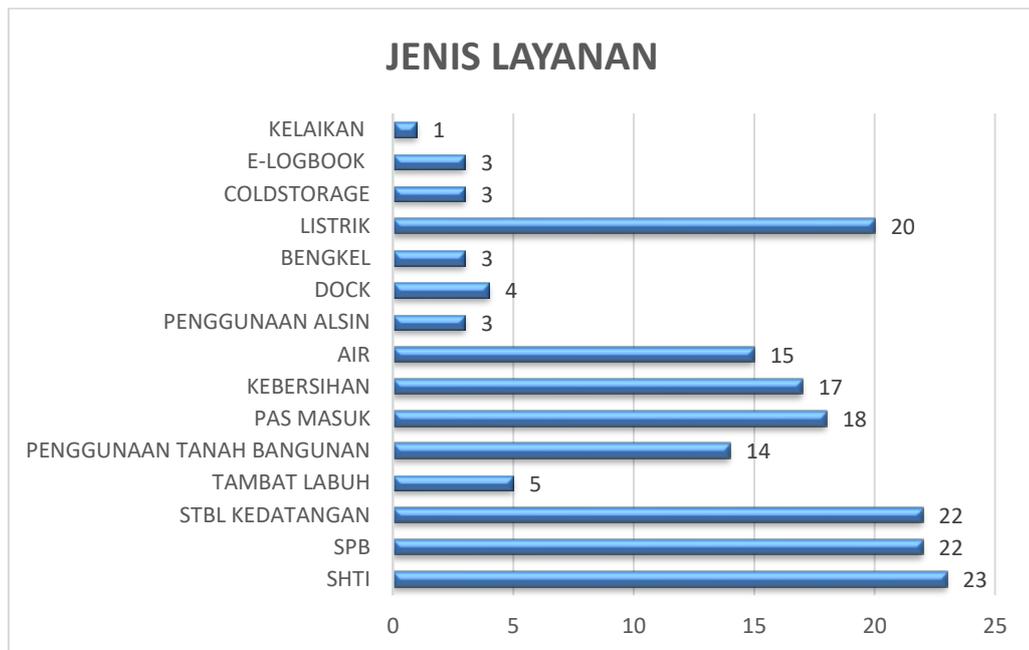
acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan Tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 173 orang.

## BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA

### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan jenis pelayanan yang diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, beberapa pengguna layanan yang berhasil dijadikan responden yaitu sejumlah 173 orang dengan rincian tertuang dalam diagram di bawah ini:



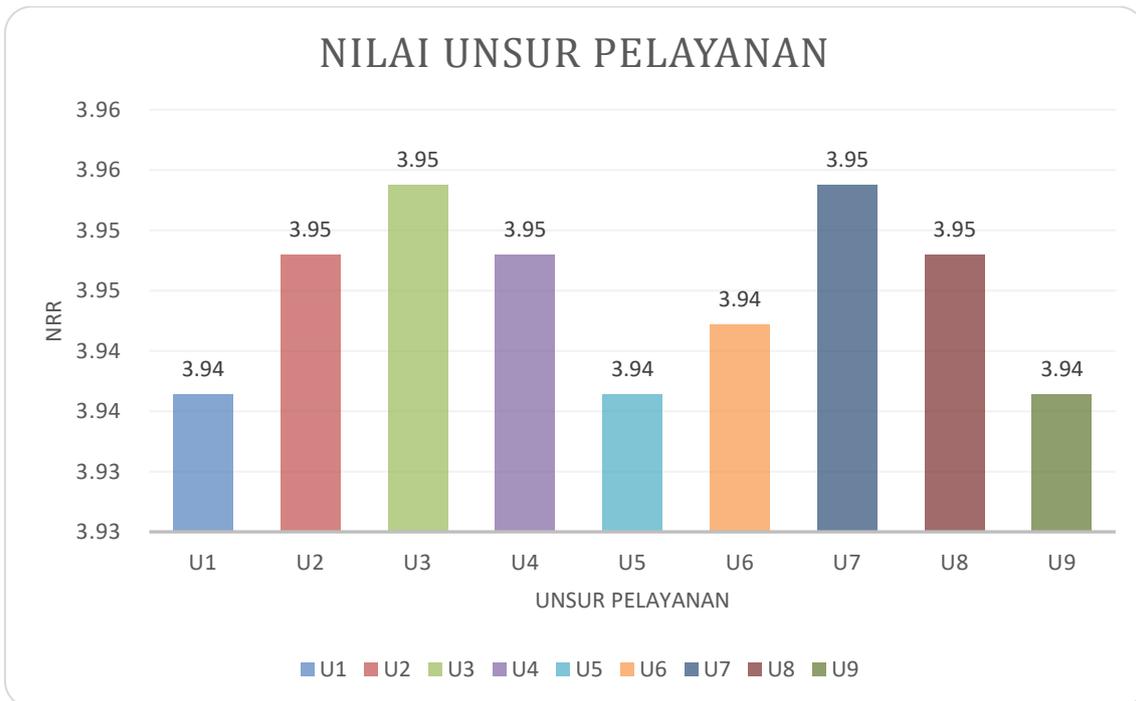


### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan

Berdasarkan hasil dari data kuesioner kepuasan masyarakat didapatkan nilai NRR (Nilai Rata-Rata) per unsur. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara lengkap sebagai berikut:

	NILAI UNSUR LAYANAN'								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	98.41	98.70	98.84	98.70	98.41	98.55	98.84	98.70	98.41
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>98.62</b>								

Dari hasil data kuisioner kepuasan masyarakat didapatkan nilai NRR (Nilai Rata-Rata) per unsur. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara lengkap sebagai berikut:



## BAB IV ANALISIS HASIL SKM

### 4.1 Analisis Permasalahan

Berdasarkan pengolahan data tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh unsur pelayanan memiliki nilai 3.94 sehingga mutu pelayanan dianggap sangat baik.
2. IKM unit layanan mendapatkan nilai 98.62 dengan predikat A atau Sangat Baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Kepada petugas layanan lapangan supaya lebih ditingkatkan lagi dengan memahami prinsip 2SA = Senyum, Sapa, Action
2. Mobil/armada pengangkut sampah diharapkan datang di setiap hari kerja.
3. Mohon diaktifkan kembali *Cold Storage*.

### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

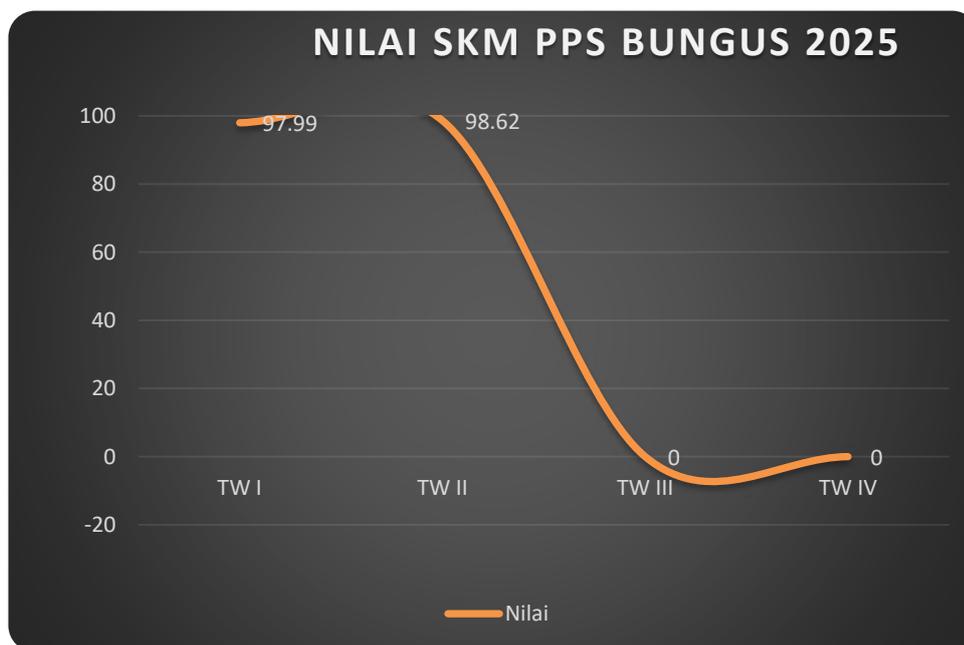
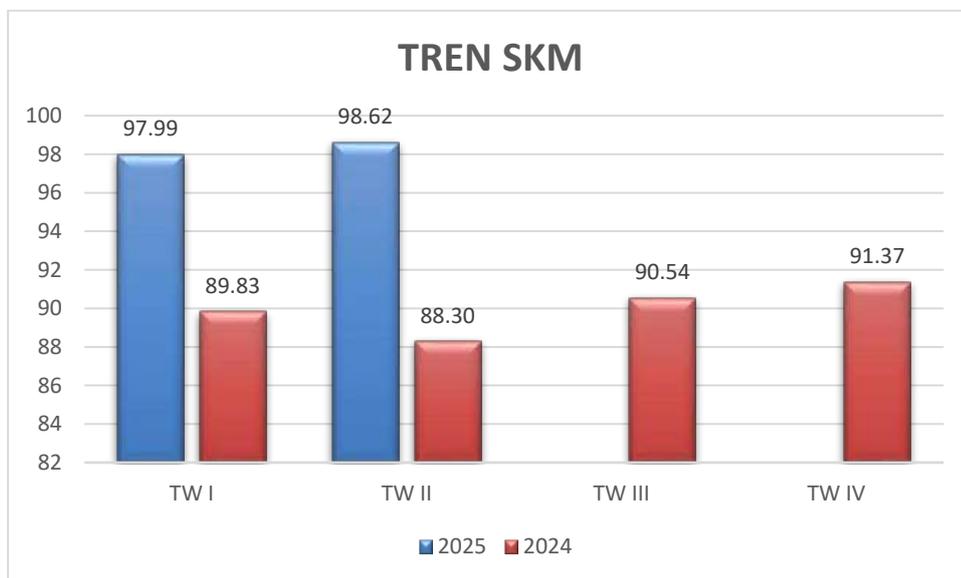
Rencana tindak lanjut adanya kritik dan saran yang membangun dari stakeholder tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Rincian Kritik dan Saran	Program atau Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kepada petugas layanan lapangan supaya lebih ditingkatkan lagi dengan memahami prinsip 2SA = Senyum, Sapa, Action	1 Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Layanan Lapangan					Katimja Dukungan Manajerial
2	Mobil/armada pengangkut sampah diharapkan datang di setiap hari kerja	2 Dilakukan perbaikan operasional sehingga dapat memperlancar pengangkutan sampah ke TPA					Katimja Dukungan Manajerial
3	Mohon diaktifkan kembali Cold Storage	3 Pengajuan Kerjasama Pemanfaatan BMN Dengan Pihak Ketiga					Katimja Pelayanan Usaha

### 4.3 Tren Nilai SKM

Berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 98.62, maka dengan ini dinyatakan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 ini mengalami

kenaikan sebesar 0.63 dibandingkan dengan periode triwulan I Tahun 2025 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97.99. Hal ini dikarenakan adanya evaluasi dan perbaikan pelayanan yang dilakukan secara terus menerus dan jumlah responden yang tidak sama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Dari seluruh data yang dihimpun dari 173 responden, didapatkan Nilai Interval (NI) Per Unsur untuk PPS Bungus Triwulan II Tahun 2025 adalah 3.94 dengan IKM = 98.62 sehingga mempunyai mutu pelayanan A atau Sangat Baik.
2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Padang, Juli 2025  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Widodo, S.Pi., M.Sc

Lampiran



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**  
**UNIT : PPS BUNGUS**



<https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/55>



## Hasil Olah Data SKM

### PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : PPS BUNGUS  
ALAMAT : Jl. Raya Padang - Painan KM. 16 Padang  
TELP/FAX : Telp (0751) 751121, Fax (0751) 751122

Layanan Kepmen 54/2022  
Jumlah Responden : 173  
Triwulan : 2

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16.	4	3	3	4	3	4	4	4	3	
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
										3.94

22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43.	3	4	4	4	4	3	3	3	3
44.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56.	3	4	3	3	3	3	3	4	3
57.	3	3	3	3	3	3	3	4	3

58.	3	4	3	3	3	4	4	4	3
59.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60.	3	4	4	3	3	4	4	3	3
61.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86.	4	4	4	4	4	4	4	3	4
87.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93.	4	4	4	3	4	4	4	4	4

94.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96.	4	4	4	4	4	4	4	4	3
97.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118.	2	2	3	4	3	3	3	3	3
119.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121.	4	4	4	3	4	3	4	3	4
122.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125.	4	3	3	4	3	3	3	4	4
126.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129.	3	3	4	3	3	3	3	3	3

130.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131.	3	3	4	4	3	3	4	3	4
132.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
136.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
139.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
141.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165.	4	4	4	4	4	4	4	4	4

166.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Nilai Per Unsur	681	683	684	683	681	682	684	683	681
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi	3.94	3.95	3.95	3.95	3.94	3.94	3.95	3.95	3.94
<b>IKM Per Pelayanan</b>									<b>98.62</b>

Keterangan:

1. U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan
2. NRR = Nilai Rata-rata
3. IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
4. \*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. \*\*) = IKM Unit Pelayanan x 25

Jenis Pelayanan ini mempunyai:

1. NRR = 3.94
2. IKM = 98.62

artinya PPS Bungus mempunyai mutu pelayanan A (Sangat Baik)

NO	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3.	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4.	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik



**KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
INDONESIA**

# **LAPORAN TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I**

---

## *TAHUN 2025*

### **PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

*Jalan. Raya Padang-Painan KM.16,, 25245 PADANG SUMATERA BARAT  
TELEPON/FAX: (0751) 751122 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [pps.bungus@kkp.go.id](mailto:pps.bungus@kkp.go.id)*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses pelayanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas.

## BAB II

### DISKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus periode Triwulan I menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	98.09	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	97.96	A
3	Waktu Penyelesaian	97.83	A
4	Biaya/Tarif	97.96	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	98.09	A
6	Kompetensi Pelaksana	97.96	A
7	Perilaku Pelaksana	98.09	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	97.96	A
9	Sarana dan Prasarana	97.96	A

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagai perbaikan pelayanan kedepan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

Untuk menunjang pelayanan yang berbasis Aplikasi dan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal di PPS Bungus.

- Diharapkan pelayanan air yg diberikan semakin cepat layanannya.
  1. Pengarahan Petugas Pelayanan terkait SOP Air

- Mohon diperbaiki sistem aplikasi online (SPB) yang ada.
  2. PPS Bungus akan terus berkordinasi dengan Direktorat Kepelabuhan Perikanan cq.Katimja Kesyahbandaran terkait waktu maintenance aplikasi agar dilakukan tidak pada jam pelayanan.
  3. Melakukan evaluasi peyedia layanan internet di ruangan pelayanan untuk meningkatkan kualitas jaringan sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai SOP.
- Sebaiknya perawatan perawatan peralatan dan mesin dilakukan secara rutin
  4. Dilakukan pengecekan berkala dan pemeliharaan

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut Triwulan IV

No	Rincian Kritik dan Saran	Program atau Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Diharapkan pelayanan air yang diberikan semakin cepat layanannya.	1. Pengarahan Petugas Pelayanan terkait SOP Air					Katimja Pelayanan Usaha
2	Mohon diperbaiki sistem aplikasi online (SPB) yang ada	2. PPS Bungus akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Kepelabuhan Perikanan cq. Katimja Kesyahbandaran terkait waktu maintenance aplikasi agar dilakukan tidak pada jam pelayanan.					Katimja Kesyahbandaran
		3. Melakukan evaluasi penyedia layanan internet di ruangan pelayanan untuk meningkatkan kualitas jaringan sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai SOP.					
3	Sebaiknya perawatan peralatan dan mesin dilakukan secara rutin.	4. Dilakukan pengecekan berkala dan perencanaan pemeliharaan.					Katimja Pelayanan Usaha

**BAB III**  
**REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT**

No	Rincian	Program/ Kegiatan	Keterangan RTL	Deskripsi Tindak Lanjut	Bukti / Dokumentasi Kegiatan	Tantangan
1	Diharapkan pelayanan air yang diberikan semakin cepat layanannya.	1. Pengarahan Petugas Pelayanan terkait SOP Air	Selesai	Telah dilakukan Pengarahan tentang SOP Air Kepada Petugas dari Katimja Pelayanan Usaha.		

<p>2</p>	<p>Mohon diperbaiki sistem aplikasi online (SPB) yang ada</p>	<p>2. PPS Bungus akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Kepelabuhan Perikanan cq. Katimja Kesyahbadaran terkait waktu maintenance aplikasi agar dilakukan tidak pada jam pelayanan.</p>	<p>Selesai</p>	<p>Katimja Kesyahbandaran berkordinasi langsung by phone dan WA Grup dengan Direktorat Kepelabuhan Perikanan terkait maintenance nya aplikasi Teman SPB.</p>		
		<p>3. Melakukan evaluasi penyedia layanan internet di ruangan pelayanan untuk meningkatkan kualitas jaringan sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai SOP.</p>	<p>Selesai</p>	<p>Mengundang Pimpinan Provider Jaringan Wifi yang sering terganggu (jelek) agar dapat di perbaiki untuk mengoptimalkan kerja dilingkungan PPS Bungus.</p>	 	

3	Sebaiknya perawatan peralatan dan mesin dilakukan secara rutin.	4. Dilakukan pengecekan berkala dan perencanaan pemeliharaan.	Selesai	Pengecekan Vessel lift secara berkala dari Tim Kerja Pelayanan Usaha agar berfungsi dengan baik	 	
---	---	---	---------	---	---	--

## BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melakukan dan merencanakan tindak lanjut sebanyak 100 %. Semua rencana tidak lanjut di periode sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Pada Triwulan I ada satu poin yang belum terlaksana yaitu pelatihan petugas kesyahbandaran bagi petugas yang belum mendapat pelatihan yg belum terlaksana dikarenakan pelaksanaan pada triwulan II bekerja sama dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang. Nota Dinas dari Direktur Layanan Infrastruktur Digital nomor : 680/DJID.4/SP.02.06/04/2025 tanggal 16 April 2025 hal Penghentian (Cut off) layanan/penggunaan Aplikasi SERENA dan Surat dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang hal penundaan jadwal sosialisasi Maritim On The Spot (MOTS) dan bimbingan teknis Long Range Certificate (LRC) dengan nomor : B-156/Balmon.13/SP.02.04/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 serta surat dari Kepala Pelabuhan Samudra Bungus nomor : B.1185/PPSB/KP.510/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 hal Pemberitahuan penundaan jadwal sosialisasi Maritim On The Spot (MOTS) dan bimbingan teknis Long Range Certificate (LRC) maka pelaksanaan kegiatan pelatihan belum bisa terlaksana .

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk senantiasa melakukan evaluasi dan menjadi lebih baik, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Padang, 4 Juni 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus



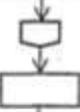
## Pengarahan Terkait SOP Air



## Dokumentasi pengambilan sampah

 <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGS</b></p>	<p>Nomor SOP : B.14/PPSB/OT.310/I/2024                  Tanggal Pembuatan : 28 November 2023                  Tanggal Revisi : 28 November 2023                  Tanggal Efektif : 02 Januari 2024                  Disahkan Oleh :                   Widodo, S.Pi, M.Sc</p> <p style="text-align: right;"><b>Relabuhan Perikanan Samudera Bungus</b></p>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam</li> <li>7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Ketentuan Pelayanan Jasa Air Bersih</li> <li>2. Memahami Jukis tentang tata cara pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelayanan Penggunaan tanah dan bangunan di Pelabuhan Perikanan</li> <li>2. SOP Pelayanan Penebitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Komputer,</li> <li>2. Unit Printer,</li> <li>3. Foto HP/Camera,</li> <li>4. Nota Pembayaran,</li> <li>5. Form Pengadaan Air</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat penerbitan Persetujuan Berlayar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Pengadaan Air</li> <li>2. Rekap pengadaan Air</li> </ol>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nahkoda/Pemilik Kapal Perikanan	Petugas Pelayanan	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi Form pengadaan air kemudian menyampaikan kepada Petugas Pelayanan				Form Pengisian Air	8 Menit	Form Pengadaan Air
2	Mencatat meter awal dan melakukan pelayanan pengisian air. Mencatat meter akhir dan menghitung jumlah pemakaian air.				Form Pengisian Air	240 menit	Rincian Pengisian Air
3	Menerima rincian pengisian air				Rincian Pengisian Air	5 Menit	Rincian Pengisian Air
4	Petugas membuat nota tagihan dan billing pembayaran berdasarkan rincian pengisian air				Nota Tagihan Pemakaian Jasa Air	10 Menit	Nota Tagihan dan kode billing Pemakaian Jasa Pengadaan Air

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nahkoda/Pemilik Kapal Perikanan	Petugas Pelayanan	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Pengguna Jasa melakukan pembayaran tagihan secara online				Kode Billing Tagihan	10 Menit	Pembayaran
6	Bendahara Penerimaan mengecek pembayaran sesuai kode billing dan menyerahkan tanda bukti pembayaran				Pembayaran	5 Menit	Bukti pembayaran
7	Pengguna Jasa menerima bukti pembayaran.				Bukti pembayaran	2 Menit	Bukti pembayaran

WA Group Admin e-PIT

08.48



Admin ePIT 2024

5 online



P

**PdK Bayu Laksmna DIT**

mohon ditunggu rekan2 sdg dilakukan pengecekan server

08.19

silahkan dicoba kembali

08.21

Selamat Pagi rekan2

Update informasi, dlm upaya peningkatan pelayanan pengguna e-PIT, maka dilakukan update sistem harian di jam 07.00 WIB, 12.00 WIB, 16.00 WIB, 20.00 WIB. Jika diwaktu tersebut rekan2 mendapat laporan ada kendala nama kapal tidak muncul dapat diinfokan kepada pelaku usha pengguna e-PIT untuk dpt ditunggu 10-20 menit ya. setelah batas waktur trsebut maka e-PIT akan normal kembali. terima kasih 🙏

cc. Ketua Tim

mas @Iwan IT KKP mas @Gindo Krisna IT KKP

Diedit 08.34



**Pak Cecep PPS Bungus**

**PdK Bayu Laksmna DIT**

Selamat Pagi rekan2

Update informasi, dlm upaya peningkata...

Siap pak, semoga bisa normal kembali

08.53

A

~ALWI

+62 813-4471-9187

*Pesan ini dihapus*



Ketik pesan



## Teknisi Provider Jaringan Wifi Yang Hadir





## Dokumentasi Pengecekan Vessel lift secara berkala



## Surat Penundaan Pelatihan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [pps.bungus@kkp.go.id](mailto:pps.bungus@kkp.go.id)

Nomor : B.1185/PPSB/KP.510/V/2025 9 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Penundaan Jadwal Sosialisasi *Maritim On The Spot* (MOTS) dan Bimbingan Teknis *Long Range Certificate* (LRC)

Yth. Pemilik / Nakhoda / Penanggung Jawab Kapal Perikanan  
di Bungus

Menindaklanjuti surat dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Padang nomor B-156/Balmon.13/SP.02.04/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal Penundaan Jadwal Sosialisasi *Maritim On The Spot* (MOTS) dan Bimbingan Teknis *Long Range Certificate* (LRC), berikut kami informasikan bahwa kegiatan dimaksud yang semula dijadwalkan tanggal 14 Mei 2025 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Widodo



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG  
*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

B. TPU Air Dingin RT 001009, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat 25171  
www.kominfo.go.id / sdppi.kominfo.go.id T: 0275118962111 WA: 08116600111  
E: rqtprlg@postel.go.id / tu.upt\_padang@kominfo.go.id

Nomor : B-156/Balmon.13/SP.02.04/05/2025 Padang, 05 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penundaan Jadwal Sosialisasi *Maritim On The Spot* (MOTS) dan Bimbingan Teknis *Long Range Certificate* (LRC)

Kepada Yth.:

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus  
di Padang

Menyusuli surat kami sebelumnya dari Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Padang nomor: B- 120/Balmon.13/SP.02.04/04/2025 tanggal 11 April 2025, hal Perubahan Jadwal Sosialisasi *Maritim On The Spot* (MOTS) dan Bimbingan Teknis *Long Range Certificate* (LRC), dan menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Layanan Infrastruktur Digital Nomor: 680/DJID.4/SP.02.06/04/2025 tanggal 16 April 2025, hal Penghentian (*cut off*) layanan/ penggunaan Aplikasi SERENA. Berdasarkan hal tersebut, diinformasikan bahwa kegiatan dimaksud yang semula dijadwalkan tanggal 14 Mei 2025 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Penundaan ini dilakukan karena diperlukan lagi waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian dan pengalihan sistem pendukung ke *platform* baru yang saat ini sedang dalam proses finalisasi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini. Informasi terkait jadwal terbaru pelaksanaan kegiatan akan kami sampaikan kemudian melalui surat resmi berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Monitor  
Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang



M. Helmi

**NOTA DINAS**

Nomor: 680/DJID.4/SP.02.06/04/2025

Kepada Yth. : Seluruh Kepala UPT Ditjen Infrastruktur Digital  
Dari : Direktur Layanan Infrastruktur Digital  
Hal : Penghentian (*cut off*) layanan/penggunaan Aplikasi SERENA  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Tanggal : 16 April 2025

Menunjuk hasil Rapat Evaluasi Aplikasi Serena yang terkait dengan pengembangan aplikasi dalam mendukung layanan publik, khususnya pemohon Sertifikat Jarak Jangkau Dekat / Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ/SJJJ) dan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN), telah disepakati bahwa mulai tanggal 16 April 2025 s/d 30 April 2025 dilakukan *cut off* /penghentian layanan penggunaan aplikasi SERENA.

Penghentian penggunaan aplikasi SERENA tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan aplikasi menuju SERENA V.2, yang bermaksud untuk meminimalisir kesalahan (deviasi dan duplikasi data) juga menjaga validitas data, pada proses pekerjaan migrasi data dari SERENA ke SERENA V.2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dihimbau kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Layanan Infrastruktur Digital untuk menunda pelaksanaan Bimtek SJJJ/SJJJ dan IKRAN. Apabila sudah terjadwalkan untuk dilaksanakan pada periode 16 s/d 30 April 2025, maka Bimtek dapat tetap dilaksanakan namun seluruh proses teknis penggunaan aplikasi dan input data akan dilakukan setelah *lauching* aplikasi SERENA V.2.

Penggunaan dan *lauching* Aplikasi SERENA V.2 direncanakan akan dapat mulai digunakan pada tanggal 1 Mei 2025, dan akan disampaikan dalam kesempatan pertama kepada seluruh Kepala UPT dan *stakeholder* terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dwi Handoko

Tembusan:  
Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital